

**MANAJEMEN KINERJA KEPOLISIAN RESOR KOTA
BESAR PALEMBANG DALAM PENANGANAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER: STUDI
KASUS DI UNIT PELAYANAN
PEREMPUAN DAN ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**



Oleh:

RATU SEPTYA

NIM.07011282126093

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**MANAJEMEN KINERJA KEPOLISIAN RESOR KOTA
BESAR PALEMBANG DALAM PENANGANAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER: STUDI
KASUS DI UNIT PELAYANAN
PEREMPUAN DAN ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**

**Oleh :
RATU SEPTYA
NIM. 07011282126093**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 2025

Pembimbing

**Annada Nasyaya S.IP., M.Si
NIP. 198809062019032016**



Mengetahui,
Ketua Jurusan



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**MANAJEMEN KINERJA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR
PALEMBANG DALAM PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS
GENDER: STUDI KASUS DI UNIT PELAYANAN PERWMPUAN DAN
ANAK**

SKRIPSI

Oleh :
RATU SEPTYA
07011282126093

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 19 Mei 2025**

Pembimbing :

1. Annada Nasyaya, S.IP., M.Si
NIP. 198809062019032016

Tanda Tangan



Penguji :

1. Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001
2. Lisa Mandasari, S.IP., M.Si
NIP. 198603272023212029

Tanda Tangan




Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratu Septya

NIM : 07011282126093

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “ Manajemen Kinerja Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam Penanganan Kekerasan Berbasis Gender; Studi Kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak “ ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 28 April 2025



Ratu Septya

NIM.07011282126093

MOTO DAN PERSEMBAHAN

*"Langkahku pelan, tapi penuh makna;
tak perlu cepat untuk sampai jika aku tahu ke mana."*

Dengan izin dan ridho Allah SWT,

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

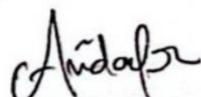
1. Kedua orang tua tercinta, Mama dan Papa
2. Saudara, kerabat dan keluarga besar
3. Dosen dan Staff FISIP UNSRI
4. Rekan-rekan seperjuangan Administrasi Publik
2021
5. Almamater tercinta, Universitas Sriwijaya, yang
telah membentuk saya hingga titik ini

ABSTRACT

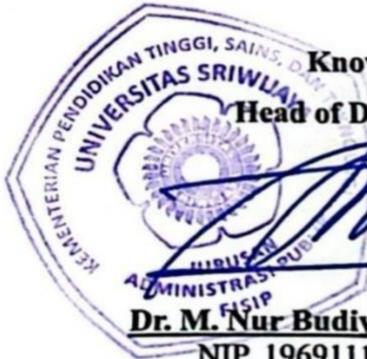
Gender-based violence remains a complex social issue that requires serious handling by law enforcement agencies, particularly the Women and Children Service Unit (PPA) at the Palembang Metropolitan Police. This study investigates how the PPA Unit manages its performance in responding to gender-based violence, analyzed through the four dimensions of public sector performance management proposed by Wouter Van Dooren: efficiency, effectiveness, accountability, and relevance. A descriptive qualitative method with a case study approach was employed, using data obtained through in-depth interviews with victims and PPA officers, direct observations, and document analysis, supported by the qualitative software Atlas.ti. The findings reveal that the unit has made significant efforts in case resolution and routine evaluations, yet still faces challenges such as limited human resources, lack of victim involvement in service evaluation, and weak integration with external support institutions. The implication of this research highlights the urgency of strengthening internal management, building a two-way victim-centered communication system, and improving inter-agency collaboration to develop a more integrated and sustainable approach to gender-based violence response.

Keywords: *Performance Management, Gender-Based Violence, PPA Unit, Palembang Police*

Advisor



Annada Nasryaya, S.IP., M.Si
NIP. 198809062019032016



**Knowing,
Head of Department**



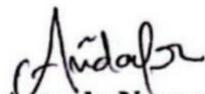
Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Kekerasan berbasis gender masih menjadi isu sosial yang kompleks dan memerlukan penanganan serius dari aparat penegak hukum, khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Palembang. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen kinerja Unit PPA dalam menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender berdasarkan empat dimensi manajemen publik menurut Wouter Van Dooren, yakni efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan relevansi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap korban kekerasan dan petugas Unit PPA, observasi langsung, serta dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak Atlas.ti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit PPA telah menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan kasus dan melakukan evaluasi rutin, namun masih dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan personel, kurangnya keterlibatan korban dalam proses evaluasi, serta belum optimalnya koordinasi dengan lembaga pendukung eksternal. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan manajemen internal, pengembangan sistem komunikasi dua arah berbasis korban, serta peningkatan kolaborasi antarinstansi sebagai upaya memperbaiki sistem penanganan kekerasan berbasis gender secara lebih terpadu dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Manajemen Kinerja, Kekerasan Berbasis Gender, Unit PPA, Polrestabes Palembang

Pembimbing



Annada Nasvaya, S.IP., M.Si
NIP. 198809062019032016

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Manajemen Kinerja Polisi Resor Kota Besar Palembang dalam Penanganan Kekerasan Berbasis Gender: Studi Kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak yang telah berperan penting, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas izin serta kehendak-Nya, penulis dapat menempuh dan menyelesaikan studi ini dengan baik hingga mencapai tahap akhir.
2. Kedua orang tua tercinta Mama dan Papa, Kak Tio dan Mba Gina yang telah memberikan kasih sayang tulus, kesabaran tanpa batas, dan doa yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
6. Bapak Januar Eko Aryansyah, S.IP., S.H., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik.
7. Ibu Annada Nasyaya, S.IP., M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi, atas segala bimbingan dan arahan, selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap saran dan masukan yang diberikan sangat berarti dan menjadi kontribusi besar dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh informan dan pihak di Polrestabes Palembang, khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), yang telah bersedia meluangkan waktu, berbagi informasi, serta mendukung proses pengumpulan data dengan baik.

9. Rayes Lesmana, yang telah kebersamai penulis sejak awal perkuliahan sampai dengan skripsi ini selesai. Terima kasih sudah selalu ada, mendukung dan selalu meyakinkan penulis bahwa setiap kesulitan pasti akan berlalu.
10. Sar & Nai, Sahabat yang selalu menemani penulis selama pembuatan skripsi ini berlangsung, terima kasih karena sudah berjuang untuk gelar ini tanpa satu hari-pun tidak mendukung satu sama lain.
11. Rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Administrasi Publik angkatan 2021 yang telah saling mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Terakhir, untuk seorang kakak yang selalu penulis panggil dengan "kak Didit" penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih karena sudah hadir sebagai Pahlawan di kehidupan perkuliahan yang melelahkan ini. Tolong, hiduplah lebih lama.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi isi maupun teknis penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Besar harapan penulis agar karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, serta menjadi kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang administrasi publik dan penanganan kekerasan berbasis gender.

Indralaya, 20 April 2025

Ratu Septya
NIM. 07011282126093

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
12.1 Latar Belakang.....	1
12.2 Perumusan Masalah.....	8
12.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1231.	
Tujuan Penelitian	9
1232.	
Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10

2.1	Landasan Teori	10
2.2	Manajemen Kinerja di Sektor Publik	10
2.2.1	Definisi	10
2.2.2	Komponen Utama Manajemen Kinerja	12
2.3	Kekerasan Berbasis Gender dan Peran Kepolisian.....	16
2.3.1	Definisi	16
2.3.2	Peran Kepolisian	17
2.4	Penelitian Terdahulu.....	23
2.5	Kerangka Berfikir.....	31
2.5	Asumsi Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN		33
3.1	Jenis Penelitian	33
3.2	Definisi Konsep.....	33
3.3	Fokus Penelitian	34
3.4	Jenis dan Sumber Data	35
3.5	Informan Penelitian	36
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.7	Teknik Analisis Data.....	39
3.8	Uji Keabsahan Data.....	41
3.9	Sistematika Penulisan.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		44

4.1 Profil Instansi	45
4.1.1 Profil Kepolisian Resor Kota Besar Palembang	45
4.1.2 Visi dan Misi	48
4.1.3 Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.....	49
4.1.4 Visi dan Misi	50
4.1.5 Fungsi dan Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak	51
4.2 Hasil dan Pembahasan	53
4.2.1 Efisiensi	53
4.2.2 Efektivitas	61
4.2.3 Akuntabilitas	69
4.2.4 Relevansi	76
4.3 Diskusi.....	80
BAB V PENUTUP.....	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Periode 2020-2025 di Kota Palembang.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	35
Tabel 4.1 Temuan Hasil Penelitian	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir Dari Teori Performance Management Wouter Van Dooren (2010)	31
Gambar 3. 1 Komponen Analisis Data: Model Interaktif	41
Gambar 4. 1 Logo Kepolisian Resor Kota Besar Palembang	45
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.....	50
Gambar 4. 3 Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM).....	56
Gambar 4. 4 Penanganan Kasus.....	60
Gambar 4. 5 Penyelesaian Kasus.....	64
Gambar 4. 6 Peningkatan Kapasitas Anggota	67
Gambar 4. 7 Pelaporan kasus dan hasil Penanganan.....	71
Gambar 4. 8 Sistem Pelaporan dan Evaluasi.....	74
Gambar 4. 9 Kebijakan yang Ditetapkan	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan merupakan segala bentuk tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikis terhadap orang lain, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menyakiti, mengendalikan, atau menunjukkan dominasi. Ia menekankan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk verbal, emosional, dan sosial, yang sering kali berlangsung secara sistemik dan berulang. Dalam konteks relasi kekuasaan yang timpang, kekerasan kerap dianggap sebagai alat legitimasi bagi pelaku untuk mempertahankan kontrol atas korban (Koeswinarno 2015).

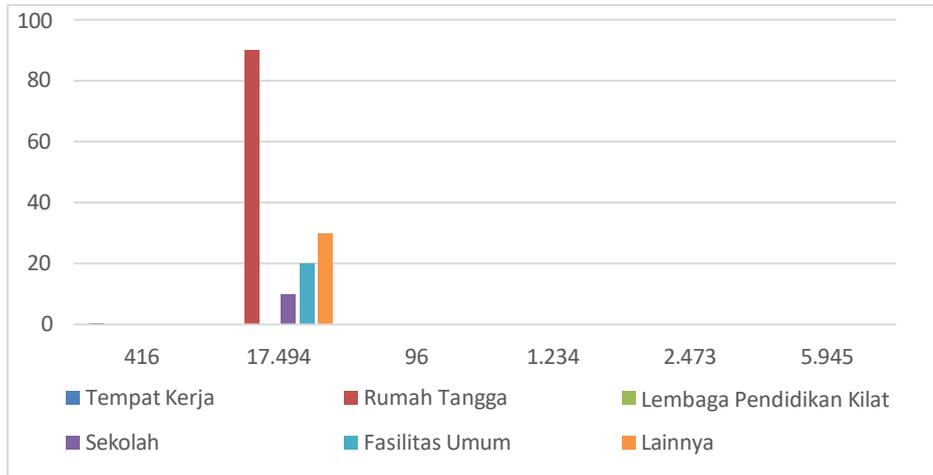
Jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, terutama yang berkaitan dengan organ reproduksi, sementara gender berkaitan dengan peran yang diberikan berdasarkan konstruksi sosial dan budaya (Prameswari et al., 2021). Kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan yang muncul sebagai akibat dari ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan antar gender, yang mengarah pada dominasi satu pihak atas pihak lain. Dominasi tersebut, pada akhirnya, menghasilkan diskriminasi terhadap gender yang dianggap lebih rendah atau inferior. Dalam konteks ini, kekerasan terhadap perempuan sering kali dianggap sebagai wujud konkret dari kekerasan berbasis gender. Kekerasan terhadap perempuan, khususnya di Indonesia, merupakan manifestasi jelas dari diskriminasi sistemik terhadap gender tertentu, yang semakin diperkuat dan dipertahankan oleh norma-norma budaya patriarki yang masih dominan.

Dalam budaya patriarki ini, perempuan tidak hanya sering kali diperlakukan sebagai objek kekerasan, tetapi juga sebagai warga negara kelas dua (*second-class*

citizen). Ketimpangan kekuasaan ini dapat ditemukan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam ekonomi, politik, pendidikan, dan hukum. Dalam banyak situasi, perempuan dipaksa untuk menerima posisi subordinat ini, baik karena norma-norma sosial yang berlaku maupun karena adanya sistem yang mendukung ketidaksetaraan tersebut. Perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender sering kali merasa terisolasi dan tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari lingkungan sekitar, baik dari keluarga, teman, maupun institusi hukum.

Kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) adalah sebuah masalah sosial yang sangat serius, yang mencerminkan ketidakadilan struktural yang telah berlangsung lama dalam masyarakat. Kekerasan ini tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi juga mencakup kekerasan seksual, emosional, dan psikologis, yang kesemuanya melibatkan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan mendominasi pihak yang dianggap lebih lemah, terutama perempuan dan anak-anak.

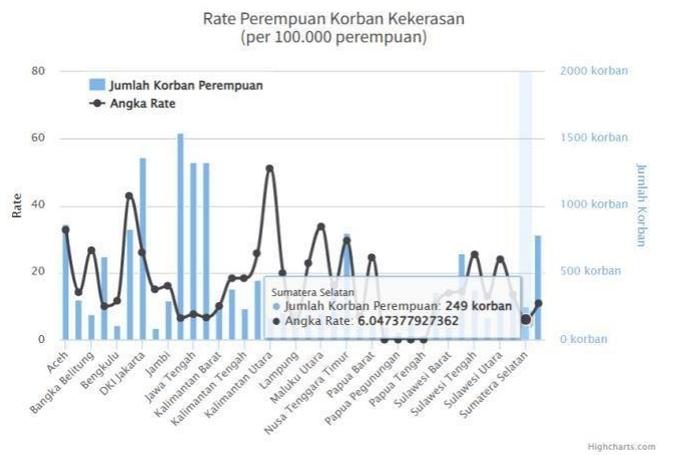
Meskipun Indonesia memiliki berbagai kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk menanggulangi kekerasan berbasis gender, namun implementasi kebijakan tersebut seringkali tidak memadai. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang tidak mendapat perhatian yang cukup dari aparat penegak hukum. Di sisi lain, ketimpangan gender yang ada dalam masyarakat dan ketidakmampuan sistem hukum untuk menjangkau semua korban, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil, semakin memperburuk situasi. Oleh karena itu, masalah ini membutuhkan perhatian lebih dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat itu sendiri, untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan berbasis gender (UN Women, 2020).



Gambar 1. 1 Jumlah Korban Berdasarkan Tempat Kejadian

Sumber : SIMFONI-PPA

Kekerasan berbasis gender di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 2024, data dari Simfoni-PPA mencatat total 27.658 perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender dengan 17.494 diantaranya mendapatkan kekerasan di dalam rumah tangga.



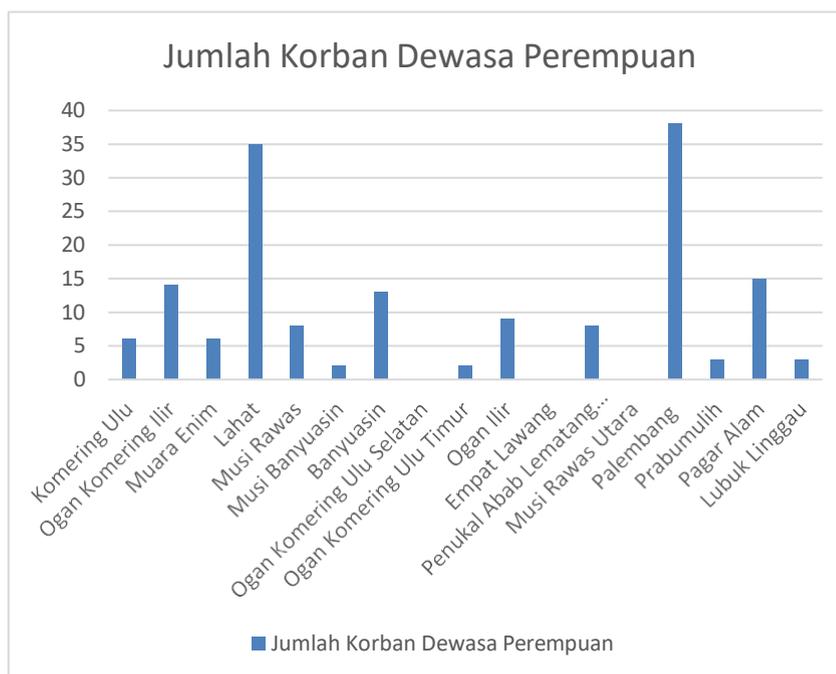
Gambar 1. 2 Rate Korban Kekerasan di Indonesia tahun 2024

Sumber : SIMFONI-PPA

Diantara banyaknya perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender, Sumatera Selatan masuk ke dalam salah-satu Provinsi terbanyak dengan perempuan sebagai korban. Berdasarkan dari data yang dipublikasikan oleh Simfoni-PPA tertera

bahwa jumlah perempuan korban kekerasan di Sumatera Selatan tercatat sebanyak 249 korban.

Data dari *Satu Data Provinsi Sumatera Selatan*, Kota Palembang tercatat sebagai kota dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan tertinggi dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain di wilayah Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di Palembang berada dalam situasi yang lebih rentan terhadap kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun kekerasan dalam rumah tangga.



Gambar 1. 3 Statistik Korban Kekerasan Berjenis Kelamin Perempuan
Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan

Kondisi ini memperkuat urgensi untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai efektivitas lembaga penegak hukum, khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Palembang, dalam menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender yang terus terjadi di kota Palembang.

Perkara	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 44 UU RI NO. 23 Tahun 2004	81	82	71	80	119	20
Kekerasan Seksual UU RI NO. 12 Tahun 2022 (UU TPKS)	96	80	59	65	59	12

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Periode 2020-2025 di Kota Palembang

Sumber : Dokumen Unit PPA Polrestabes Palembang Berdasarkan

data yang didapat dari tabel di atas, kekerasan berbasis gender di

Kota Palembang seperti KDRT dan Kekerasan seksual selama lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif yang memprihatinkan dan membutuhkan penanganan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memperkuat penegakan hukum, edukasi publik, serta layanan pendukung korban agar kekerasan berbasis gender dapat ditekan secara berkelanjutan.

Di tengah meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender, penting untuk memiliki sistem yang efektif untuk menangani kasus-kasus ini. Salah satu langkah penting yang diambil oleh kepolisian adalah dengan mendirikan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Unit ini berfokus pada penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Unit PPA berperan dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban, serta memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan baik dan adil.

Polrestabes Palembang, sebagai salah satu institusi penegak hukum di Indonesia, memiliki Unit PPA yang memainkan peran sentral dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender di wilayah Palembang dan sekitarnya. Palembang, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, merupakan salah satu kota dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, yang sering kali berdampak pada meningkatnya kasus kekerasan berbasis

gender. Dalam kondisi tersebut, Unit PPA Polrestabes Palembang dituntut untuk berperan aktif dalam memberikan perlindungan kepada korban dan menegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan berbasis gender.

Dalam konteks ini, manajemen kinerja yang diterapkan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Palembang menjadi aspek krusial dalam memastikan efektivitas penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Manajemen kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dengan menetapkan sasaran, mengukur kinerja, serta melakukan evaluasi terhadap pencapaian yang telah diraih (Armstrong & Baron, 2005). Manajemen kinerja juga merupakan proses komunikasi yang terus-menerus dan dilakukan dalam bentuk kemitraan antara seorang karyawan dan atasan langsungnya (Bacal, 1999). Proses ini mencakup upaya untuk menetapkan harapan yang jelas serta memastikan pemahaman yang tepat terkait dengan tugas yang harus diselesaikan. Dalam institusi kepolisian, manajemen kinerja yang efektif mencakup perencanaan strategis, pelaksanaan tugas yang profesional, evaluasi berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender secara efektif dan sensitif.

Perencanaan strategis dalam manajemen kinerja Unit PPA Polrestabes Palembang dilakukan dengan menyusun kebijakan dan prosedur standar operasional dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Perencanaan strategis merupakan upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa organisasi (atau entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu (Bryson, 2003). Dalam konteks kepolisian, perencanaan strategis tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga aspek

pencegahan dan perlindungan terhadap korban. Strategi yang diterapkan mencakup penyusunan kebijakan perlindungan korban, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi antar lembaga (Kaplan & Norton, 2004). Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif meningkatkan produktivitas serta efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan manajemen kinerja di Unit PPA Polrestabes Palembang mencakup berbagai tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh aparat kepolisian. Investigasi yang efektif dalam mengumpulkan bukti, pemeriksaan saksi, serta pelaksanaan proses hukum yang transparan menjadi bagian dari implementasi manajemen kinerja yang berkualitas. Efektivitas kepolisian dalam menangani kejahatan bergantung pada keterampilan investigasi serta pendekatan berbasis komunitas dalam pencegahan kekerasan (Kelling, Wilson 1982).

Evaluasi dan pengawasan kinerja merupakan tahapan penting dalam memastikan efektivitas layanan Unit PPA Polrestabes Palembang. Evaluasi kinerja adalah proses sistematis dalam mengukur efektivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Aguinis, 2014). Evaluasi dalam organisasi publik harus dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis data agar dapat menghasilkan perbaikan yang signifikan (Harry & Scott, 2006). Monitoring berkala dilakukan untuk menilai sejauh mana keberhasilan unit dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender.

Dalam penerapan manajemen kinerja, Unit PPA Polrestabes Palembang menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam jumlah personel maupun fasilitas yang tersedia. Efektivitas organisasi sangat bergantung pada kecukupan sumber daya, baik sumber daya manusia, finansial, maupun infrastruktur (Robbins & Mary Coulter, 2016). Dengan jumlah personel yang

terbatas, aparat kepolisian sering mengalami kesulitan dalam menangani banyaknya laporan yang masuk, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian kasus.

Secara keseluruhan, kekerasan berbasis gender merupakan isu yang sangat kompleks dan memerlukan perhatian serta penanganan yang holistik. Melibatkan seluruh lapisan masyarakat, lembaga penegak hukum, serta pemerintah adalah kunci untuk mengatasi masalah ini. Dalam hal ini, peran Polrestabes Palembang melalui Unit PPA menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan berbasis gender. Evaluasi terhadap kinerja Unit PPA diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki sistem penanganan kekerasan berbasis gender dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan setara.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penting untuk dilakukan penelitian yang mengevaluasi secara komprehensif bagaimana manajemen kinerja Polrestabes Palembang dalam menangani kekerasan berbasis gender, khususnya dalam aspek penanganan kasus melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Diharapkan, hasil penelitian ini dapat mempengaruhi kualitas hidup perempuan dan anak-anak di Indonesia, termasuk di kota Palembang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen kinerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Memahami, mengidentifikasi dan menganalisis manajemen kinerja Kepolisian Resor Kota Besar Palembang khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam peningkatan manajemen kinerja penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG), khususnya terkait dengan peran lembaga penegak hukum, seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Palembang. Dengan demikian penelitian ini diharapkan bisa memperkaya literatur yang ada.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam menangani kasus Kekerasan Berbasis Gender, sehingga membantu peningkatan kapasitas dan efektivitas unit dalam memberikan perlindungan dan penegakan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. prenadamedia group.
- Addabbo Tindara, Edoardo Ales, Ylenia Curzi, & Tommaso Maria Fabbri. (2020). Performance Appraisal in Modern Employment Relations An Interdisciplinary Approach: An Interdisciplinary Approach.
- Aguinis, Herman. (2014). Performance management. Pearson.
- Ahyar, J., & Safrida, S. (2020). Optimalisasi Pelayanan Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 6(2), 69–89. <https://doi.org/10.52137/humanis.v6i1.20>
- Andriani, M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. . Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan Dan Administrasi Publik, 1(2), 107–124.
- Arikunto. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Armstrong, & Baron. (2005). Managing Performance; Performance Management in Action. CIPD Publishing.
- Astuti, D. (2023). Relasi Kuasa Dalam Kekerasan Berbasis Gender. Jurnal Ilmiah

- Padma Sri Kreshna, 5(2). <https://doi.org/10.37631/psk.v5i2.1050>
- Bacal, R. (1999). *Performance Management*. Penerbit The McGraw-Hill International. New York.
- Bryson, M. John. (2003). *Perencanaan Strategis*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). (Thousand Oaks). CA: Sage.
- Dessler, Gary. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (10th ed.). PT Indeks: Jakarta.
- Diana, H. M. (2020). *Strategi Komunikasi Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Sleman Dalam Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak* [Doctoral Dissertation]. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa .
- Fadlurrahman, L., Peneliti, A., Magister, D., & Publik, A. (2014). *Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan*. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkap.7>
- Fitriana, A., & Wiwik Indrayanti, K. (2024). *Peranan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (Studi Di Kepolisian Resort Malang Kota)*. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i4.1395>
- Harry, H., & Scott, B. (2006). *Performance Measurement*.
- Jocelyne Bourgon. (2008). *The Future of Public Service: A Search for a New Balance*. *Australian Journal of Public Administration*, 67(4), 390–404.
- Kaplan, R. S. and N. D. P. (2004). *The Strategy Map: Guide to Aligning Intangible Assets*. *Strategy & Leadership*. 32, 10–17.

- Kelling, G. L. , & W. J. Q. (1982). Broken windows: The police and neighborhood safety. The Atlantic (1st ed.).
- Kettunen, J. (2015). Stakeholder relationships in higher education. *Tertiary Education and Management*, 21(1), 56–65.
<https://doi.org/10.1080/13583883.2014.997277>
- Kurniawan, A. (2021). Peran unit ppa dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak (studi kasus di polres pekalongan kota).
- Latief, C. M. B., & Santoso, R. S. (2020). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Terhadap Korban Keke Rasan Berbasis Gender Di Kabupaten Wonogiri. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(3).
<https://doi.org/10.14710/jppmr.v9i3.28168>
- Lori L, H. (1998). *Violence Against Women: An Integrated, Ecological Framework*. 4(3). Merriam, S. B. (1998). *Qualitative Research and Case Study Applications in Education*.
 Jossey-Bass Publishers.
- Miles B, M. , H. M. A. , & S. J. (2020). *Qualitative Data Analysis*. 21(1). Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Munasaroh, A. (2022). Problematika kekerasan berbasis Gender dan Pencapaian Gender equality dalam Sustainable development Goals di indonesia.
<https://komnasperempuan.go.id/download->
- Nugroho Okky, C. (2017). Peran balai masyarakatan pada sistem peradilan pidana anak di tinjau dalam perspektif hak asasi manusia (the role of balai masyarakatan on juvenile justice system reviewed from human rights perspective). In *Jurnal HAM* (Vol. 8, Issue 2).

<http://www.pikiran-rakyat.com/bandungraya/2015/08/04/337054/sepuluh-ribu-anak-kiniberhadapan-dengan-hukum>,

Pambudi, Y. D., Astuti, P., & Fitriyah. (2016). Peran badan pemberdayaan perempuan perlindungan Anak dan keluarga berencana dalam perlindungan Perempuan korban kekerasan berbasis gender di Jawa Tengah. *Journal of Politic and Government Studies*.

Permatasari, S. D., & Alfirdaus, L. (2024). Analisis Efektivitas Peran Pusat Pelayanan Terpadu (Ppt) Seruni Dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Di Kota Semarang Periode Kepengurusan Tahun 2011-2019 Sinta Dewi Permatasari *), Laila Alfirdaus**). <https://fisip.undip.ac.id>

Prameswari, J. R. , Hehanussa, D. J. , & Salamor, Y. B. (2021). Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial. *Pamali*, 1(2), 55–61.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47268/pamali.v1i1.484>

Rafi Hidayat. (2018). Analisis Hasil Belajar Efektif Dari Penerapan Smart Learning. *Jurnal Sistem Cerdas*. 1(1), 33–40.

Riduwan. (2012). *Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika*. Bandung: Alfabeta.
Robbins, S. P., & Mary Coulter. (2016). *Manajemen Coulter*.

Ruky, A. S. (2002). *Sistem manajemen kinerja*. Gramedia Pustaka Utama.

Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis , Karakteristik dan Keunggulannya*. PT Grasindo.

Siahan, A., Hidayasha, A., Tun'nisa, M., Dalimunthe, N., & Kholis, Z. (2024). Evaluasi sistem manajemen kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di min 1 medan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7 Nomor 3,

2024.<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.29384>

Soegiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.

Thathit Manon Andini. (2019). Identifikasi kejadian kekerasan pada anak di kota malang. Universitas Muhammadiyah Malang, 2(1).

Trisnawati, A. C. D., & Firsty Chintya Laksmi Perbawani. (2024). Efektivitas upaya penanganan kekerasan berbasis gender di yunani: analisis istanbul convention 2018- 2022. Journal Publicuho, 7(1).
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.347>

Udekusuma. (2007). Performance Management. University of Indonesia.

UN Women. (2020). Respect Women:How to use the RESPECT framework implementation guide. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/07/respect-women-implementation-package>

UNHCR. (2009). Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons.

Wachid, W. (2017). Peran badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Karanganyar dalam Pendampingan Korban Kekerasan Seksual guna Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan. Surakarta. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Wibisono, D. (2006). Manajemen Kinerja, Konsep, Desain, dan Teknik Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. Jakarta. Erlangga.

Wouter Van Dooren. (2010). Performance Management in the Public Sector.

Yuningsih, N. (2017). Penerapan Manajemen Kinerja Pegawai di Instansi Pemerintah. Jurnal Pengembangan Wiraswasta, 19(2), 141–154.